

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi semakin menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi, baik dalam dunia pendidikan, media sosial maupun dalam dunia bisnis. Teknologi informasi digunakan bukan hanya sebagai pendukung tetapi juga sebagai kebutuhan utama yang dapat digunakan untuk menyediakan informasi dengan cepat. Teknologi informasi telah banyak digunakan untuk mendukung proses bisnis yang terjadi pada perusahaan, usaha keluarga, usaha mikro menengah ke bawah, dan lain-lainnya. Salah satunya Badan Usaha Milik nagari (BUMnag) dalam penerapan teknologi informasi simpan pinjam.

Badan Usaha Milik nagari (BUMnag) merupakan usaha desa atau nagari yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik nagari. BUMnag "karya Bersama" merupakan salah satu cabang bumnag yang ada di Kecamatan Sutera, setiap kenagarian mempunyai BUMnag masing-masing, dan di Kenagarian Surantih mempunyai BUMnag "karya Bersama", pendirian BUMnag dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi (kredit dan simpan pinjam) atau pelayanan umum yang dikelola oleh Nagari atau kerja sama antar nagari, baik yang berkembang menurut adat istiadat atau budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program pemerintahan daerah.

Simpan pinjam BUMnag merupakan jenis usaha yang bergerak di bidang perhimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat melalui usaha simpan pinjam yang dikelola secara individu di bawah badan usaha milik desa yang di bentuk oleh pemerintah desa. Pemberian pinjaman dana kepada calon nasabah pun harus dengan persetujuan dari pihak BUMnag.

Perkembangan dibidang simpan pinjam pada BUMnag tidak lepas dari suatu permasalahan yang dialami setiap BUMnag, permasalahan dalam penentuan calon nasabah dan jumlah pinjamannya, hal tersebut membutuhkan proses waktu selama 3-4 hari menganalisa kredit pinjaman, kas simpan pinjam BUMnag sampai pemberian keputusan. Keputusan tersebut pada umumnya memerlukan pertimbangan karena setiap calon nasabah mempunyai kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Pihak BUMnag melakukan rapat musyawarah dalam penentuan pemberi pinjaman, seiring terjadi ketidaksepakatan antara pihak yang akan meminjam, sehingga mengakibatkan tidak meratanya pemberian pinjaman kepada anggota BUMNag. Pemberi pinjaman terhadap calon nasabah tentu banyak resiko atau masalah yang dialami oleh para staff BUMnag, salah satunya resiko kredit macet sehingga terjadinya angsuran yang tidak lancar berasal dari internal bumnag nasabah dan juga dari eksternal BUMnag.

Sistem pendukung keputusan merupakan sekumpulan prosedur berbasis model guna membantu dalam mengambil keputusan pemberi jumlah pinjaman pada calon nasabah. Proses SPK terdiri dari beberapa alternatif dan beberapa kriteria yang diolah untuk memecahkan masalah dan dapat meningkatkan keakuratan keputusanyang diambil. Dalam mencari dan menentukan keputusan berdasarkan teknologi dapat dilakukan dengan banyak metode, salah satunya metode Analytic

Hierarchy Process(AHP).

Analytic Hierarchy Process(AHP) merupakan suatu metode pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L, seorang ahli matematika pada tahun 1970, metode ini dikembangkan dengan tujuan utama untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks tidak tersruktur kedalam beberapa komponen dalam susunan yang hierarki dengan memberi nilai relatif dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi dan prioritas variabel yang paling rendah, guna mempengaruhi hasil keputusan pemberi jumlah pinjamn kepada calon nasabah.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam penelitian ini penulis mengangkat sebuah topik yang bertujuan untuk merancang sebuah aplikasi sistem penunjang keputusan dengan judul “ **IMPLEMENTASI METODE AHP PADA SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMBERI JUMLAH PINJAMAN KEPADA CALON NASABAH BUMnag**”Karya Bersama “”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis dapat merumuskan beberapa masalah diantaranya :

1. Bagaimana sistem pendukung keputusan dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dapat menghasilkan keputusan yang tepat ?
2. Bagaimana sistem pendukung keputusan dengan Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dapat menentukan penerima dan jumlah pinjaman kepada calon nasabah?

1.3 Hipotesa

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dapat diambil beberapa hipotesa, yaitu :

1. Diharapkan dengan adanya sistem penunjang keputusan dengan menerapkan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dapat menghasilkan keputusan yang tepat.
2. Diharapkan dengan adanya SPK penentuan jumlah pinjaman akan menjadi pertimbangan staff BUMNag dalam menentukan keputusan kepada calon nasabah.

1.4 Batasan Masalah

Untuk menghindari terjadinya pengembangan masalah yang lebih luas dan penulisan penelitian ini lebih terarah maka penulis menetapkan batasan-batasan terhadap masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana sistem pendukung keputusan dengan menerapkan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dapat menghasilkan keputusan yang tepat ?
2. Kategori apa saja yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penerima jumlah pinjaman calon nasabah?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Membangun sistem pendukung keputusan yang dapat menghasilkan keputusan yang tepat dan akurat.
2. Menerapkan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dalam pembuatan sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Database mysql yang mampu untuk membantu pengambilan keputusan dalam penentuan jumlah pinjaman kepada calon nasabah.

1.6 Manfaat Penelitian

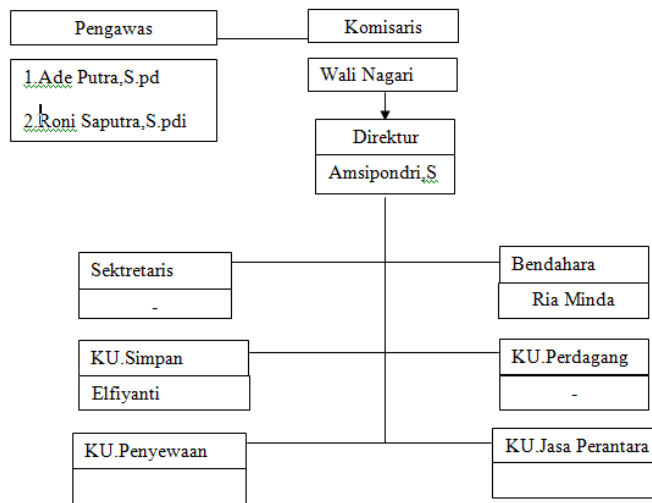
Dalam pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:

1. Dari sistem yang dibangun dapat membantu para staff BUMNag dalam pengambilan keputusan dalam penentuan penerima dan jumlah pinjaman kepada calon nasabah.
2. Dengan adanya sistem pendukung keputusan penentuan jumlah pinjaman kepada calon nasabah dapat memudahkan para staff mengambil keputusan yang tepat
3. Membantu meringankan kinerja para staff agar lebih efisien dan tepat waktu
4. Dapat membuat calon nasabah lebih cepet dalam memperoleh informasi apakah berkas pengajuan diterima atau ditolak untuk pencairan dana.

1.7 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan sistem yang mendefinisikan hierarki dalam suatu organisasi ini mendefinisikan setiap pekerjaan, fungsinya dan kemana ia melaporkan ke dalam organisasi, kemudian dikembangkan untuk menetapkan bagaimana organisasi beroperasi untuk melaksanakan tujuannya.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi pada Badan Usaha Milik nagari (BUMnag) dapat disajikan pada Gambar 1.1.



Gambar 1. 1 Struktur BUMnag”Karya Bersama”

1.7.1 Sejarah BUMnag

Sejarah BUMnag di Aur Duri Surantih tidak terlepas dari keberadaan program pemberdayaan desa (PPD), program pemberdayaan desa (PPD) adalah suatu bentuk program penanggulangan kemiskinan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah rendahnya kesejahteraan rakyat yang merupakan kewajiban pemerintahan sesuai agenda utama pembangunan nasional. undang No.6/2014 tentang Desa, bertujuan meningkatkan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan. Dalam menjalankan perannya tersebut, desa atau nagari (untuk daerah Sumatera Barat), dapat menumpangkan misinya tersebut pada salah satu unit ekonomi yang ada di nagari, yaitu Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag, atau di daerah lain disebut BUMDes) Nagari Aur Duri Surantih, yang merupakan salah satu nagari di kec Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, memiliki Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang bernama BUMNag “KARYA BERSAMA” (Enterpreneur, Mandiri, Aman, Sejahtera) yang berdiri berdasarkan

Peraturan Nagari No.5/2015. BUMNag “KARYA BERSAMA berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (ART), memiliki berbagai jenis usaha, seperti pertanian, perdagangan, dan juga pengelolaan sampah, termasuk juga akan mengembangkan usaha simpan pinjam/keuangan, yang berbasis syariah, sesuai dengan ajaran Islam, dan filosofi “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. Keberadaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) penting sebagai bagian dari instrumen memajukan perekonomian masyarakat. Untuk itu sangat diperlukan peningkatan kapasitas dan penguatan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, dan profesional dalam mengelola BUMNag. Dari modal desa dan simpanan dari masyarakat, kemudian Unit Usaha Perkreditan Barang (elektronik, perabot, dll) Badan Usaha Milik nagari (BUMnag)” KARYA BERSAMA” sumber makmur desa surantih mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Transparansi Seluruh operasional BUMnag harus dilakukan secara transparan(terbuka)dan diketahui oleh masyarakat luas. Dengan transparansi atau keterbukaan maka segala sesuatu yang dilakukan akan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

b. Partisipasi Partisipasi dalam BUMnag sumber makmur adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap kegiatan BUMnag mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan

c. Desentralisasi Desentralisasi bermakna sebagai pemberian kewenangan kepada masyarakat atau lebih mendasar adalah sejauh mana masyarakat memperoleh kembali hak-haknya yang otonom untuk mengelola pemabangunan secara dan partisipasif.

d. Kompetisi sehat Setiap pengambilan keputusan penting dalam BUMnag dilakukan melalui musyawarah dan bersifat secara sehat untuk menentukan prioritas kegiatan yang didanai, berdasarkan hasil kajian atau lebih teliti terhadap

1.7.2 Aktivitas pada bagian kepegawain

- a. Bagian administrasi
 - 1. Melaksanakan pemeriksaan berkas pengajuan pembiayaan calon nasabah baru
 - 2. Melaksanakan survey oleh bagian KU.Simpan pinjam
 - 3. Membuatkan laporan survey lapangan
 - 4. Menentukan pemberi jumlah pinjaman kepada calon nasabah
 - 5. Penentuan pengajuan bagi calon nasabah diterima atau ditolak
 - 6. Jika diterima maka lanjut ke tahap pemenuhan syarat-syarat selanjutnya
- b. Bagian accounting/pembukuan
 - 1. Menyiapkan berkas pembiayaan
 - 2. Menyiapkan kwintasi pembayaran
 - 3. Mencatat transaksi ke buku besar
 - 4. Membuat laporan keuangan
- c. Bagian penagihan pinjaman
 - 1. Menyiapkan daftar tagihan
 - 2. Menjemput tagihan ke anggota pembiayaan